

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang terkategori Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Ida farida) 2020 adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kegiatan ini dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Penyediaan Perumahan, berupa perbaikan rumah tidak layak huni.

Di desa Simarigung sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani namun hasil yang mereka dapat tidak cukup untuk memenuhi dari banyaknya kebutuhan mereka terlebih mengharapkan rumah yang layak huni

Dengan adanya program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sekaligus mengurangi angka pengangguran di Desa Simarigung, Tentunya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan

nyaman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah ada sejak tahun 2016 dan ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mempunyai rumah.

Akan tetapi Fokusnya penelitian ini adalah kurang tepatnya sasaran program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang dibuat oleh Pemerintah Desa sebagai upaya dalam mengurangi rumah yang tidak layak huni di Desa Simarigung, kurang tepatnya program bantuan ini dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara pemerintah desa dan masyarakat tertentu (mampu). Hal ini berdampak pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah yang dimana mereka tidak dapat merasakan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). dilihat dari penyaluran bantuan BSPS ada beberapa masyarakat yang mampu namun diberikan bantuan, Hal ini dilihat dari kriteria rumah yang dimiliki masih layak dibandingkan dengan rumah lainnya, sedangkan ada beberapa masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni tapi tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dana Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulana Perumahan Swadayaa Bab IV pasal 11 bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan BSPS adalah masyarakat yang:

Perseorangan penerima BSPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. Memiliki dan menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah;
- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- d. Belum pernah memperoleh bantuan BSPS bantuan pemerintah untuk program pemerumahan.

- e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum daerah provinsi
- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggungrenteng.

Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik ataupun layak maka harus dipenuhi syarat fisiknya yaitu aman sebagai tempat tinggal untuk berlindung, memenuhi rasa kenyamanan dan sehat, layak huni untuk anggota keluarga. Dalam memenuhi rasa kenyamanan dan kesehatan serta menciptakan keadaan yang layak huni, maka diperlukan adanya upaya pembangunan, yaitu proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran.

Dan kesejahteraan masyarakat proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan, Dimana pembangunan dilakukan untuk perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat tentunya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup mereka. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang sehat dan layak huni, Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan pemerintah karena

kondisi rumah yang dimiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria rumah yang layak huni.

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat mulai dari usulan penerima dan yang tidak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan dilihat dari yang tidak memiliki Rumah pada tahun 2019

No	Jenis Bantuan	Usulan (orang)	Penerima (orang)	Yang tidak menerima (orang)
1	Pembangunan Baru	45	22	23
Jumlah		45	22	23

Sumber: Kantor Kepala Desa Simarigung (2019)

Dari data diatas bisa dilihat bahwa yang di usulkan untuk dapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 45 kepala dan yang menerima hanya sebanyak 22 kepala keluarga yang menerima Bantuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana Kinerja Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Simarigung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Desa Simarigung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui apasaja Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah pemahaman dan pengetahuan peneliti serta dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan Menjadi referensi pembelajaran bagi para mahasiswa jurusan Ilmu administrasi Publik

2. Manfaat Praktis

Mampu menjadi bahan masukan saran dan pemikiran bagi pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melaksanakan evaluasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya di Desa Simarigung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.5 Keaslian Posisi Penelitian

Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan ranoyapo kabupaten minahasa selatan (2021) *Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan 1-9.*

Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan 1444 H / 2022 M. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan 1444 H / 2022 M, 88.*

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa(2021) *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, 35-45.*

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sumberarum Moyudan Sleman (2018). *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sumberarum Moyudan Sleman, 303-314.*

Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo(2022) *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 12.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dikemukakan oleh James Anderson, dalam Rusli (2013:38) sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu, Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan public mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata mata merupakan pernyataan pemerintah ,keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Secara terdefiniskan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan interpretasi kebijakan dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan

pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam kebijakan publik memiliki tahapan tahapan Anderson dalam Budi Winarno (2002:15) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, Sedangkan menurut Woll (1966) dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2003:2) dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat
2. Kedua, Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.³
3. Ketiga, Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jadi pada dasarnya, studi kebijakan publik berorientasi pada Implementasi penyelesaian masalah tengah masyarakat nyatanya yang terjadi Berdasarkan uraian tersebut diatas, berbicara tentang kebijakan tidak akan lepas dari program sebagai pelaksanaan kebijakan, Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

2.2. Model Kebijakan

Pada umumnya seseorang membuat sebuah model dalam Hutahean (2008) adalah untuk digunakan dalam berbagai hal seperti merancang sebuah penelitian atau untuk mengkaji kembali studi yang pernah dilakukan oleh orang lain, Hal ini dilakukan karena model dapat mengidentifikasi dengan jelas variable variabel yang terdapat dalam setiap studi atau penelitian yang dilakukan.

Model Kebijakan yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah kombinasi model yang dikembangkan Gaffar (1996) dan Dye (1978) dan Wahab (1990). Model model yang dimaksud antara lain

1. Model umum (General Model)

Model ini adalah modal yang sangat dikenal dalam analisis kebijakan maupun proses kebijakan dikatakan model umum karena memang model ini sangat umum, Pada model ini para actor kebijakan berinteraksi pada lingkungan yang ada disekeliling mereka.

2. Model Perceptual-Process,

Model ini menekankan peran dari persepsi para actor kebijakan tentang lingkungan mereka bersama yang berasal dari pemerintah, Model kedua ini barangkali sangat bermamfaat untuk digunakan dalam proses kebijakan di Indonesia sebab model ini menekankan pada bagaimana persepsi pemerintah (dalam arti luas) tentang suatu masalah.

3. Model Stuktural

Dalam model ini faktor lingkungan baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal dianggap sebagai factor-faktor yang sangat menentukan setiap kebijakan diputuskan

4. Model Elit

Model ini adalah merupakan abstraksi dari suatu proses kebijakan dengan mana kebijakan public dapat dikatakan identic dengan persepsi elite politik.

5. Model Kelompok

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang didalamnya bebrapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi kebijakan dan bentuk kebijakan secara interaktif.

6. Model Rasional

Model rasional berasal dari pemikiran Herbert.A Simon tentang perilaku administrasi, Simon menekankan bahwa inti dari perilaku administrasi adalah proses pengambilan keputusan secara rasional.

7. Model Intrekmental

Model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap kritik terhadap model rasional Kritik tersebut pertama sekali dilontarkan oleh Charles E

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui informasi kebijakan derivet atau turunan dari

kebijakan publik tersebut, Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu melalui program, keproyek melalui kegiatan Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat .

Implementasi menurut Mazmanian, Daniel H dan Paul A, Sabatier (1983) sebagai dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomanpedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak Nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Nugroho (2003:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang) Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik, Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam

manajemen khususnya manajemen sektor public Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat Program proyek dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn proses implementasi kebijakan akan berbedah-bedah sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn mengatakan ada beberapa karakteristik dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Proses implementasi yang dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya.
2. Proses implemetasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Agostiono (2010) yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan di ukur karena implementasi tidak dapat berhasil bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan

2. Sumber-sumber kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme dalam implementasi kebijakan public. Jika koordinasi komunikasi baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka implementasi akan berjalan secara efektif.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

2.2.2 Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Dari beberapa teori tentang implementasi maka penulis menggunakan Teori nya George C. Edward III (dalam buku Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu:

1. Komunikasi Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mengetahui atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).

- b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, parah pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru

akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya, Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu;

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi

perintah Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan, Implementer harus mengetahui orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang.

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di situ pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselenggarakan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencakup, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, Karna itu pemilihan dan peningkatan personil pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

4. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah stuktur birokrasi Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan, Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Implementasi kebijakan mengarah pada apa yang terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatankegiatan yang terjadi setelah proses, baik usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengelolah wilayah tingkat desa Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa .

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakatnya

Pemerintah Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.4 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).Program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat.

Sedangkan stimulan diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,

Penyaluran berarti suatu proses, penyampaian, pembuatan, cara menyalurkan dan mengalirkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990: 773).

Sedangkan menurut Sudijono (2011:35) penyaluran adalah “proses pendistribusian, pembagian atau pencairan” Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.

Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan diri manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya.

Perumahan berasal dari kata dasar Rumah Menurut Wahab (2014:9) rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun untuk istilah tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep social kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.

2.4.1. Manfaat Dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Adapun manfaat atau dampak positif dari implementasi program ini bagi penerima bantuan adalah (Tuwis Hariyani 2016)

1. mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena mereka tidak lagi memiliki tanggungan untuk membuat rumah,

2. Secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri karena rumahnya lebih bagus dari sebelumnya,
3. meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan membangun rumah bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya, dengan kondisi rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni, maka akan meningkatkan kualitas kesehatan, dan
4. memberikan rasa aman bagi penghuninya,
5. mewujudkan Ketahanan Ekonomi,
6. meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan

Dimana dampak program ini selain terpenuhinya sandang, pangan, perumahan, lapangan kerja, dan untuk jangka panjang dapat menurunkan angka kemiskinan tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan, keamanan, psikologis, dan sosial masyarakat penerima bantuan. Dan semua itu merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan, sebagaimana pendapat Goulet dalam Theresia, et.al., (2014:2) yang mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan, yaitu:

1. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhankebutuhan dasar hidupnya yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, pendidikan dasar, keamanan, kesehatan, rekreasi, dll.
2. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.

3. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

2.4.2. Faktor –Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program, diantaranya adalah

1. Adanya Kepentingan yang Mempengaruhi

Sebagaimana yang diungkapkan Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154) bahwa “suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, maka hal itulah yang perlu diketahui lebih lanjut”. Kepentingan disini adalah kepentingan dari Pemerintah Kabupaten (SKPD) dan Kepala Desa yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga kepentingan yang terkait dengan keberlanjutan program. Selain itu bagi Kepala Desa keberhasilan program ini akan memberikan memberikan citra yang baik terhadap dirinya. Selain itu, kepentingan dari fasilitator dimana fasilitator berusaha menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin, sehingga menunjukkan kinerja yang bagus dengan harapan akan dijadikan pertimbangan untuk diusulkan lagi sebagai fasilitator pada program berikutnya. Dan yang paling penting adalah adanya kepentingan pribadi dari penerima bantuan yaitu dimilikinya rumah yang layak huni Sebagaimana pendapat Agustino (2014:159) yang menyatakan: “seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung

dari suatu proyek kinerja maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, mendukung dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.”

2. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai pada implementasi suatu kebijakan juga turut menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Karena derajat perubahan yang ingin dicapai pada implementasi program ini memiliki ukuran yang jelas dan realistis sehingga derajat perubahan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi program ini adalah sebagaimana tujuan dibuatnya program BPS ini yaitu untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Hal itu sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik dari Grindle (1980) dalam Agustino (2014:155), yaitu bahwa setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, dan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.” Sebagaimana juga hal itu sesuai dengan pendapat yang disampaikan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142), bahwa: “kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2.4.3. Faktor – Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya:

1. Letak Pengambilan Keputusan Program BSPS ini merupakan kebijakan yang sifatnya “top down” dimana semua ketentuan yang menetapkan adalah pusat dalam hal ini adalah berada di tingkat kementerian. Namun pada tingkat penerima bantuan, sebelum bantuan benar-benar disalurkan, ada tahapan penyiapan masyarakat, dengan tujuan saat bantuan diterima oleh masyarakat, maka mereka telah benar-benar siap untuk melaksanakan program ini sehingga harapannya dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BSPS ini di lapangan. Namun pada parakteknya tahapan penyiapan masyarakat ini kurang berjalan maksimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan program. Sehingga dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, karena masyarakat belum benar-benar siap melaksanakan program ini terutama dari aspek ketersediaan swadaya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:145), yaitu “sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
2. Keterbatasan sumberdaya akan sangat mengganggu jalannya pelaksanaan kebijakan, sebagaimana pendapat Grindle (1980) dalam Agustino (2014:155) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya

yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.” Pendapat tersebut benar adanya, dimana pada implementasi Program BPS ini terdapat beberapa kendala sehingga menghambat pelaksanaan program, yang disebabkan oleh karena sumberdaya yang ada kurang mendukung pelaksanaan program dengan kata lain ada keterbatasan pada sumberdaya yang digunakan

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Handayani,Safrida(2022) Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Metode Kualitatif	Hasil penelitian berdasarkan empat indikator tersebut kebijakan program BPS ini berhasil akan tetapi masih adanya permasalahan dalam bantuan ini untuk Kabupaten Langkat hanya dua Kecamatan yang sudah terealisasi yaitu Kecamatan Babalan dan Kecamatan Secanggang, sementara Kecamatan lain nya terkhusus Kecamatan Sei Lapan Kelurahan Alur Dua belum terealisasi
2	Asrul Asjak (2013) Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukannya kendala-kendala dilapangan seperti kurangnya peralatan dalam penginputan data calon penerima bantuan dan masih adanya Pemerintah setempat yang

			kurang aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
3	Ali Musa (2021) Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan optimal dengan indikator dalam penelitian 1)Pemberdayaan Masyarakat, 2)Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan, indikator tersebut belum terlaksana sehingga berdampak terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
4	Zumrotul Mu'minim (2018) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	Meode Kualitatif	Hasil penelitian juga menunjukkan factor-faktor yang berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman menggunakan model implementasi George Edward III yakni factor komunikasi telah berjalan efektif dan sosialisasi dapat langsung diterima oleh pelaksaan kegiatan dan target group, dengan adanya system koordinasi yang baik antara Kabupaten dan Desa

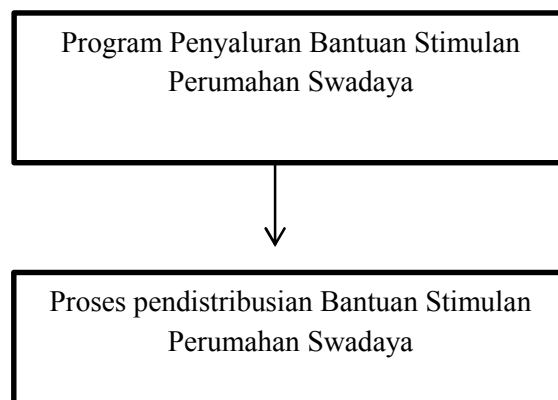
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

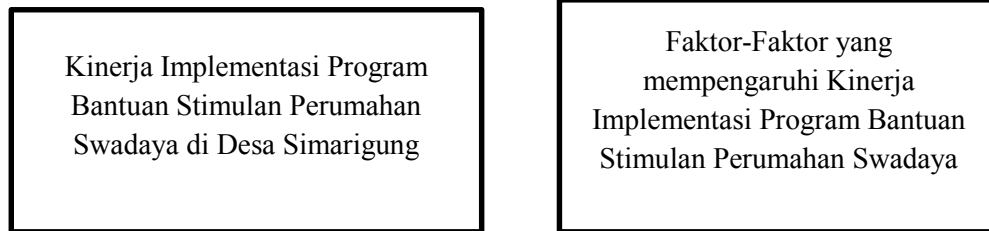
- a. Persamaan dengan Skripsi Dewi Handayani, Sarida yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif mengenai fenomena dan fakta yang terjadi dilapangan. adapun perbedaanya yaitu dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah terealisasikan dengan baik di dua kecamatan yaitu kecamatan babalan dan kecamatan secanggang. Sedangkan penelitian yang saya laksanakan di Desa Simarigung dengan

pelaksanaan program yang belum terealisasi dengan baik karena dalam penyaluran Bantuan yang belum tepat.

- b. Persamaan dengan skripsi Asrul Asjak, yaitu sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penulis hanya menganalisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Simarigung sedangkan peneliti terdahulu ingin mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam melaksanakan BSPS.
- c. Persamaan dengan skripsi Ali Musa yaitu sama menggunakan metode kualitatif dan adanya kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan BSPS. sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ali Musa ini menggunakan Analisis Pelaksanaan
- d. Persamaan dengan skripsi Zumrotul Mu minim yaitu sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama menggunakan model Implementasi George Edward III. adapun perbedaannya adalah dalam penelitian skripsi Zumrotul menggunakan judul Efektivitas dan pelaksanaannya berjalan secara efektif baik itu dari kegiatan dan target pembangunan yang tepat waktu dan sosialisasi yang langsung diterima masyarakat sementara saya menggunakan implementasi dan dalam pelaksanaan BSPS belum maksimal dalam pelaksanaan ataupun sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat.

2.6 Kerangka Berpikir





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Menurut John Creswell (2013) Penelitian Kualitatif adalah Pendekatan riset untuk

mempelajari relasi antar variable Variable yang disajikan dapat diukur dengan menggunakan instrument tertentu sehingga data berupa angka yang didapat dari hasil riset dapat digunakan untuk menganalisis melalui produser statistika.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, presepsi, pendapat atau keyakinan orang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka Jenis Metode yang didunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertempat di Desa Simarigung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan waktu Penelitian berlangsung selama satu bulan dalam bulan April-Juli 2023.

3.3 Informan Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan informan, Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pertanyaan-pertanyaan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti ditempat penelitian diantaranya:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang

Kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar juga memahami informasi tentang informasi utama

Berdasarkan pengertian informan kunci diatas peneliti memutuskan bahwa informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Simarigung

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, Dari pengertian informan utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Simarigung.

3. Informan Tambahan

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif Berdasarkan pengertian informan pendukung diatas peneliti memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Simarigung

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Menurut (Maryadi dkk, 2010) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan teknik yang mungkin diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama Menurut (Sugiyono, 2005) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data” Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Adapun teknik pengumpulan dan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode antara lain :

a. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2010) pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data atau bahan yang sudah ada sebelumnya yang kemudian digunakan kembali untuk data primer.

Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang berkompetisi serta memiliki referensi dengan masalah yang akan diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Secara umum, pengertian analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi Kemudian analisis data juga merupakan proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada analisis pertama maka dilakukan pengumpulan data dengan hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui penacarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting, Caranya ialah peneliti menulis ulang catatan-catatan di lapangan yang dibuat (ketika wawancara)Apabila wawancara direkam, maka dilakukan transkrip hasil rekaman terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pemilihan informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberi tanda- tanda, kemudian penggalan bahan tertulis yang penting yang sesuai dengan yang dicari, dan penulis Reduksi Data Pengumpulan Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh informan atau dokumen dalam penggalan tersebut.

c. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami adalah cara yang paling penting dan utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data tahap akhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data yang peneliti dapat dari lapangan